

PENGARUH KARAKTERISTIK PENGANGGARAN, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Batang Hari)

Yulia Istia Ningsih¹

Abstract

This research aims to test the influence of the characteristics of the application of budgeting, accounting information systems, and public accountability against the performance of managerial Work Unit (SKPD) Area Device Batang Hari. The phenomenon in this study is the evaluation of the Governors of the five Day Rod Unit Working Device area (SKPD) because it is not able to achieve the original target of revenue (PAD) Region in the year 2014. The population of this research is the entire Financial Manager Officer Derah Unit Working Device area (SKPD) Batang Hari. Samples prepared in this research as much as 146 by using purposive sampling method. Data collected by way of disseminating a questionnaire. The research of using multiple regression analysis with Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 22. The results of this study indicate that simultaneous budget participation variables, clarity of goals to budget, budget feedback, the difficulty of the achievement of objectives, the evaluation of the implementation of the budget, accounting information systems, and public accountability effect on managerial performance. Clarity of goalsto budget, budget feedback, evaluation, budget and public accountability in partialeffect significantly to managerial performance, whereas a variable participation budget, the difficulty of the achievement of the goals, and the application of the systemaccounting information has no effect on performance of significant managerial. The results of this research show that the independent variables the dependent variableimpact of 96.4%.

Keywords: managerial performance, budget participation

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan, yakni sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Otonomi daerah menjalankan beberapa misi yaitu: 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah yang luas

dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*) (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang

¹ Dosen STIE Graha Karya Muara Bulian

memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2003). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Indra, 2006). Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Dengan demikian, kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan

hasil atau mencapai tujuan. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbandingan terhadap anggaran harus dilakukan untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif/tidak efektif. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja.

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja, suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter, dan berupa proyeksi pada masa yang akan datang, sehingga dapat menjadi pedoman kerja entitas dalam menjalankan kegiatannya. Sebuah entitas yang dalam operasionalnya mengacu pada pedoman kerja yang tertuang dalam anggarannya, dapat menciptakan efektivitas operasional dalam mencapai tujuan entitas tersebut. Faktor-faktor yang terdapat pada Karakteristik Penganggaran (*Budgetary Goal Characteristic*) perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. *Budgetary Goal Characteristic* terdiri dari lima komponen, yaitu partisipasi penganggaran (*budgeting participation*), kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*), kesulitan sasaran anggaran (*budgeting goal difficulty*), umpan balik anggaran (*budgeting feedback*), dan evaluasi anggaran (*budgeting evaluation*). Kenis (1979) berpendapat bahwa pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya memperhatikan lima komponen *Budgetary Goal Characteristic*.

Kinerja manajerial selain dipengaruhi oleh karakteristik

penganggaran, juga dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi dan akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengungkapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Sistem ini diciptakan agar nantinya terciptalah suatu informasi yang berupa laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja dari suatu daerah.

Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah mengungkapkan bahwa setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD. Keandalan laporan keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem akuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, salah satunya yaitu teknologi informasi. Sistem akuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan maupun bidang teknis (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006).

Penelitian karakteristik penganggaran ini lebih spesifik pada program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran/RKA-SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Fenomena tentang karakteristik penganggaran yang terjadi pada tahun 2014 di Kabupaten Batang Hari yaitu adanya evaluasi dari Bupati Batang Hari terhadap lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena tidak mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu. Kelima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak mencapai target PAD tersebut adalah Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas Perkotaan, Dinas Peternakan dan Bagian Aset, sementara Dinas Perindagkop justru gagal mencapai realisasi PAD untuk 2014 (tribunjambi, 2015). Keadaan ini membuktikan bahwa kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari khususnya kelima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut belum bisa menunjukkan kinerja yang sesuai dengan harapan.

Peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Abata (2014) tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada sektor produk makanan di Nigeria. Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel dan objek yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) karakteristik penganggaran yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, dan evaluasi anggaran. Penelitian ini memilih Kabupaten Batang Hari, yang mana berbeda dengan penelitian Abata (2014) yaitu pada sektor swasta. Anggaran pada sektor swasta merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada

sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005).

Variabel penerapan sistem informasi akuntansi ditambahkan dalam penelitian karena berdasarkan PP No. 71/2010 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada 2015 seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basis*). Setiap daerah memiliki pemahaman yang sangat beragam terkait dengan sistem yang akan diterapkan. Penggunaan sistem aplikasi juga harus diterapkan, termasuk di dalamnya ketika terdapat sistem yang berbeda, bagaimana mengkonsolidasinya, sehingga bisa *compatible* antara satu sistem dengan sistem lainnya (dprd.batanghari.go.id).

Pemerintah daerah mengupayakan mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan. Hal ini terlihat dari Bupati Batang Hari yang mengadakan sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatar belakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi

masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. UU Keterbukaan Informasi Publik secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Kualitas proses pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan bagian penting yang berkesinambungan dengan proses penganggaran (Putra, 2013). Pelaksanaan proses penganggaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur oleh semua aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari sehingga mengalami peningkatan kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kemen PAN dan RB RI yang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan analisa kerja terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2014 diperoleh capaian akhir kinerja sasaran sebesar 54,90 meningkat dari tahun lalu yang sebesar 50,21, dengan predikat nilai CC. Nilai ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam capaian sasaran termasuk dalam Kategori CC (Cukup Baik) (www.jambiupdate.com).

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara simultan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah? 2) Apakah

terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara parsial terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah? 3) Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 1) Untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara simultan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah; 2) Untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara parsial terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah; 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Konsep anggaran yang dikemukakan di atas memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada lingkup organisasi tertentu. Menurut Atkinson dan Kaplan (1995), anggaran negara merupakan suatu pernyataan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode waktu di masa yang akan datang, yang meliputi informasi pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa kini dan masa lalu. Dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan, sebenarnya peran anggaran selain sebagai alat perencanaan, anggaran juga merupakan alat bagi manajer untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi bawahannya. Untuk itu pentingnya anggaran dalam suatu organisasi akan terlihat dari peran dan tujuan anggaran. Tujuan utama penyusunan anggaran menurut Anthony (1998), adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki rencana strategis organisasi.
2. Mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian organisasi.
3. Menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan otorisasi besarnya biaya yang boleh dikeluarkan, dan memberikan umpan balik kepada manajer atas kinerja mereka.
4. Sebagai perjanjian atau komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer sesungguhnya.

Mekanisme Penyusunan APBD

Penyusunan APBD tahun anggaran 2015 masih tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu

pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran (*output*) dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang dipresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007, dalam menyusun APBD tahun anggaran 2008 ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu (*unifilied budget*) dimana dalam menyusun rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu, harus tetap sejalan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Karakteristik Penganggaran

Menurut Kenis (1979) ada 5 (lima) karakteristik penganggaran (*Budgetary Goal Characteristics*) yaitu:

1. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legislatif saling beradu argumen dalam pembahasan RAPBD. Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), dan setelah itu Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran.

2. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya.
3. Umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya untuk mencapai sasaran, maka ia tidak mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan, dan tidak ada insentif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik.
4. Kesulitan sasaran anggaran mempunyai rentang sasaran dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan dalam kategori ketat namun dapat dicapai adalah tingkat kesulitan sasaran anggaran. Kenis (1979) menyatakan manajer yang memiliki tujuan anggaran yang terlalu ketat secara signifikan memiliki ketegangan kerja tinggi dan motivasi kerja rendah, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya dibandingkan untuk anggaran memiliki tujuan anggaran tepat atau ketat tetapi dapat dicapai. Hal ini mengidentifikasi bahwa

- ketat tapi dapat dicapai adalah tingkat kesulitan tujuan anggaran.
5. Evaluasi anggaran dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja unit kerja. Evaluasi anggaran dengan kinerja memiliki kecenderungan hubungan yang lemah. Manajer memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja dalam suatu gaya *punitive* (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja anggaran).

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Pengelolaan SKPD merupakan sistem informasi akuntansi bagi pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2002).

Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menurut Wayan (1997) dalam Putra (2013), kinerja pemerintah daerah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2009).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
- H₂ : Partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
- H₃ : Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
- H₄ : Umpan balik secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
- H₅ : Kesulitan pencapaian tujuan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

H₆ : Evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

H₇ : Penerapan sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

H₈ : Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

1. Aparat pemerintah daerah yang ada di Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor dan Inspektorat yang membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
2. Aparat tersebut yang menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran.
3. Pendidikan terakhir minimal S1 dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden atas beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden. Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan secara

berstruktur yang mana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. Penyebaran kuesioner terhadap responden dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari, untuk selanjutnya membagikan kuesioner tersebut kepada responden. Pengambilan kembali kuesioner disesuaikan dengan waktu yang telah disepakati oleh peneliti dengan yang bersangkutan. dan data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari literatur, studi pustaka, jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian dalam penelitian ini.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Partisipasi anggaran (X₁) yaitu tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan oleh individu dalam proses perencanaan anggaran (Milani, 1975) dalam Istiyani (2009). Partisipasi anggaran tersebut menunjukkan pada luasnya partisipasi aparat pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Andarias Bangun (2009) dengan pengukuran skala *likert* 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
2. Kejelasan sasaran anggaran (X₂) menunjukkan sejauhmana tujuan anggaran program dan kegiatan SKPD dinyatakan secara spesifik, jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran. Instrumen pengukuran digunakan dari Andarias Bangun (2009) dengan pengukuran skala *likert* 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
3. Umpan Balik Anggaran (X₃) merupakan alat ukur sejauh mana individu mengetahui sampai dimana tujuan anggaran program dan kegiatan telah dicapai. Variabel ini diukur menggunakan instrumen dari Istiyani (2009) dengan pengukuran skala *likert* 5 (lima) point dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju

2. Kesulitan Pencapaian Tujuan (X_4) merupakan tingkatan kesulitan pencapaian tujuan anggaran program dan kegiatan yang dipersepsikan oleh individu dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Instrumen pengukurannya mengadopsi dari Istiyani (2009) yang memodifikasi instrumen dari Kenis (1979) dengan pengukuran skala *likert* 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
3. Evaluasi Anggaran (X_5) didefinisikan sejauh mana selisih anggaran program dan kegiatan SKPD ditelusur oleh pimpinan ke masing-masing bawahan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Instrumen pengukuran diadopsi dari Istiyani (2009) yang memodifikasi instrumen dari Kenis (1979), dengan pengukuran skala *likert* 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
4. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_6) adalah informasi yang berhubungan dengan informasi keuangan daerah terkait dengan bagaimana persepsi kepala SKPD dalam memperkirakan ketelitian, keterkaitan, ketepatan waktu dan format yang dihasilkan oleh SIKD menyangkut informasi anggaran yang disajikan dalam kegiatan operasional yang bersifat rutin. Variabel ini diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Permadi (2013) dengan pengukuran skala *likert* 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin tinggi penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.
5. Akuntabilitas Publik (X_7) merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik kepada DPRD dan masyarakat. Instrumen pengukuran diadopsi dari Putra (2013) dengan pengukuran skala *likert* 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
6. Kinerja Manajerial (Y) merupakan prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja seseorang. Kinerja aparat pemerintah daerah dalam penganggaran dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dicapai dan dapat dikendalikan. Variabel kinerja manajerial diadopsi dari instrumen yang digunakan oleh Bangun (2009) dengan pengukuran skala *likert* 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis penelitian dan metode analisis regresi berganda. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan alat uji statistik dengan bantuan *software* SPSS 22. Sebelum melakukan pengujian, data tersebut harus ditransformasikan menggunakan *method of successive interval* (MSI). Hal ini dikarenakan data yang diperoleh dari pengukuran yang menggunakan skala Likert adalah data ordinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat (*pearson correlation*) antara masing-masing skor item dengan total skor variabel. Suatu indikator pernyataan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing skor item menunjukkan hasil yang signifikan. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $n=122$ adalah 0,176. Hasil uji validitas instrument dalam penelitian ini akan disajikan pada table dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. Validitas Item Pertanyaan Partisipasi Anggaran (X₁)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,795	0,176	Valid
2	0,759	0,176	Valid
3	0,593	0,176	Valid
4	0,754	0,176	Valid
5	0,764	0,176	Valid
6	0,622	0,176	Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 2. Validitas Item Pertanyaan Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,659	0,176	Valid
2	0,695	0,176	Valid
3	0,629	0,176	Valid
4	0,684	0,176	Valid
5	0,714	0,176	Valid
6	0,656	0,176	Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 3. Validitas Item Pertanyaan Umpan Balik Anggaran (X₃)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,894	0,176	Valid
2	0,943	0,176	Valid
3	0,937	0,176	Valid
4	0,807	0,176	Valid
5	0,669	0,176	Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 4. Validitas Item Pertanyaan Kesulitan Pencapaian Tujuan (X₄)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,702	0,176	Valid
2	0,757	0,176	Valid
3	0,916	0,176	Valid
4	0,934	0,176	Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 5. Validitas Item Pertanyaan Evaluasi Anggaran (X₅)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,683	0,176	Valid
2	0,792	0,176	Valid
3	0,688	0,176	Valid
4	0,613	0,176	Valid
5	0,635	0,176	Valid
6	0,826	0,176	Valid
7	0,562	0,176	Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 6. Validitas Item Pertanyaan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X₆)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,915	0,176	Valid
2	0,888	0,176	Valid
3	0,838	0,176	Valid
4	0,931	0,176	Valid
5	0,740	0,176	Valid
6	0,817	0,176	Valid
7	0,421	0,176	Valid
8	0,664	0,176	Valid
9	0,563	0,176	Valid
10	0,631	0,176	Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 7. Validitas Item Pertanyaan Akuntabilitas Publik (X₇)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,769	0,176	Valid
2	0,876	0,176	Valid
3	0,663	0,176	Valid
4	0,634	0,176	Valid
5	0,607	0,176	Valid
6	0,816	0,176	Valid
7	0,494	0,176	Valid
8	0,556	0,176	Valid
9	0,615	0,176	Valid
10	0,485	0,176	Valid
11	0,687	0,176	Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 8. Validitas Item Pertanyaan Kinerja Manajerial (Y)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,801	0,176	Valid
2	0,594	0,176	Valid
3	0,649	0,176	Valid
4	0,603	0,176	Valid
5	0,738	0,176	Valid
6	0,563	0,176	Valid
7	0,533	0,176	Valid

Sumber : Data Primer 2015

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini menggunakan nilai *Cronbach Alpha*, yang mana nilai *Cronbach Alpha* dinyatakan reliabel jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,60 (Ghozali, 2009). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Kesimpulan
Partisipasi Anggaran (X_1)	0,803	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	0,754	Reliabel
Umpan Balik Anggaran (X_3)	0,904	Reliabel
Kesulitan Pencapaian Tujuan (X_4)	0,851	Reliabel
Evaluasi Anggaran (X_5)	0,798	Reliabel
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_6)	0,911	Reliabel
Akuntabilitas Publik (X_7)	0,857	Reliabel
Kinerja Manajerial (Y)	0,760	Reliabel

Sumber : Data Primer 2015

Uji Asumsi Klasik

Model regresi dapat digunakan untuk estimasi dengan signifikan dan representatif jika model regresi tersebut tidak menyimpang dari asumsi klasik regresi berupa: normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

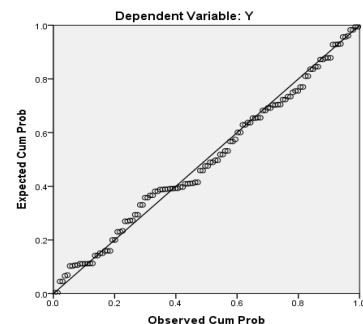
Uji Normalitas**Tabel 10. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov Smirnov Test)**

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09548954
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.058
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data Primer 2015

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, yang mana signifikannya menunjukkan hasil diatas 5%, maka distribusi data dinyatakan normal. Uji normalitas dapat diperjelas lagi tentang sebaran data dalam penelitian ini yang akan disajikan dalam grafik normal P-plot. Dimana dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2006) yaitu :

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1. Grafik Normal P-Plot

Sumber : Data Primer 2015

Grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi

layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Independen

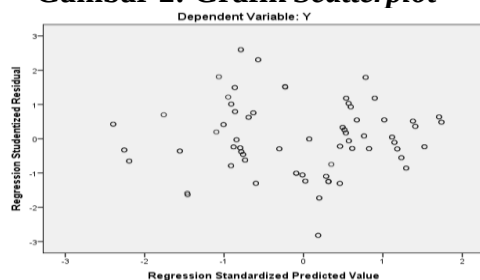
Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIP	
Partisipasi Anggaran (X_1)	0,654	1,530	Tidak terjadi multikolinearitas
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	0,539	1,858	Tidak terjadi multikolinearitas
Umpun Balik Anggaran (X_3)	0,385	2,597	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesulitan Pencapaian Tujuan (X_4)	0,199	5,027	Tidak terjadi multikolinearitas
Evaluasi Anggaran (X_5)	0,206	4,864	Tidak terjadi multikolinearitas
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_6)	0,106	9,473	Tidak terjadi multikolinearitas
Akuntabilitas Publik (X_7)	0,270	3,707	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 12 menunjukkan bahwa angka *tolerance* dari variabel independen partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpun balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2: Grafik Scatterplot



Sumber : Data Primer 2015

Hasil pengolahan data penelitian ini menampilkan pada grafik *scatterplot* penelitian ini titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja manajerial dengan masukan variabel independennya

Analisis Regresi Berganda dan Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi berganda. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpun balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.

Tabel 12. Hasil Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kesulitan Pencapaian Tujuan, Evaluasi Anggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial

Variabel Independen	Coefficients Beta	t hitung	Sig
(Constant)	-0,331	-3,380	0,001
Partisipasi Anggaran (X ₁)	0,003	0,158	0,875
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₂)	0,73	3,087	0,003
Umpan Balik Anggaran (X ₃)	0,84	4,015	0,000
Kesulitan Pencapaian Tujuan (X ₄)	-0,35	-1,071	0,286
Evaluasi Anggaran (X ₅)	0,187	4,833	0,000
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X ₆)	-0,060	-1,427	0,156
Akuntabilitas Publik (X ₇)	0,833	22,537	0,000
R ² = 0,964			
Adjusted R ² = 0,962			
F hitung = 433,233			
Signifikansi F = 0,000			

Sumber : Data Primer 2015

Hubungan antara variabel dependen dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,331 + 0,003X_1 + 0,73X_2 + 0,84X_3 - 0,35X_4 + 0,187X_5 - 0,060X_6 + 0,833X_7$$

Ket:

Y = Kinerja Manjerial

□□ = konstanta (tetap)

□□1, □□2, □□3, □4, □5, □6, □7

= koefien regresi

X₁ = Partisipasi AnggaranX₂ = Kejelasan Sasaran AnggaranX₃ = Umpan BalikX₄ = Kesulitan Pencapaian TujuanX₅ = Evaluasi AnggaranX₆ = Penerapan Sistem Informasi AkuntansiX₇ = Akuntabilitas Publik**Pengujian Hipotesis**

Uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap persamaan regresi menyimpulkan bahwa persamaan tersebut layak digunakan dalam model persamaan matematis. Tabel 4.12 mempresentasikan nilai *square* (R²) yang merupakan nilai koefisien determinasi, uji kelayakan model (F-test), dan uji t (t-test) sebagai alat untuk menguji hipotesis penelitian.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F)

Hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau F test seperti yang ditampilkan pada tabel 4.12 di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 433,233 dengan signifikansi 0,000. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial atau dapat dikatakan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji ini untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\alpha \leq 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika nilai signifikansi $\alpha > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

1. Variabel Partisipasi Anggaran (X_1), menunjukkan *coefficient beta* sebesar 0,003 pada tingkat signifikansi 0,875, karena tingkat signifikansi $0,875 > 0,05$. Hal ini berarti variabel Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari, dengan demikian Hipotesis H_1 tidak terbukti.
2. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2), menunjukkan *coefficient beta* sebesar 0,073 pada tingkat signifikansi 0,003, karena tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$. Hal ini berarti variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari, dengan demikian Hipotesis H_2 terbukti.
3. Variabel Umpan Balik Anggaran (X_3), menunjukkan *coefficient beta* sebesar 0,084 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel Umpan Balik Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari, dengan demikian Hipotesis H_3 terbukti.

4. Variabel Kesulitan Pencapaian Tujuan (X_4), menunjukkan *coefficient beta* sebesar -0,035 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi $0,286 > 0,05$. Hal ini berarti variabel Kesulitan Pencapaian Tujuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari, dengan demikian Hipotesis H_4 tidak terbukti.
5. Variabel Evaluasi Anggaran (X_5), menunjukkan *coefficient beta* sebesar 0,187 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel Evaluasi Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari, dengan demikian Hipotesis H_5 terbukti.
6. Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_6), menunjukkan *coefficient beta* sebesar -0,060 pada tingkat signifikansi 0,156, karena tingkat signifikansi $0,156 > 0,05$. Hal ini berarti variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari, dengan demikian Hipotesis H_6 tidak terbukti.
7. Variabel Akuntabilitas Publik (X_7), menunjukkan *coefficient beta* sebesar 0,833 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat

signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel Akuntabilitas Publik berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari, dengan demikian Hipotesis H_7 terbukti.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.15 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,964. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik sebesar 96,4 % dan 3,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik penganggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.

2. Hasil penelitian partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari secara parsial sebagai berikut:

- a. Variabel partisipasi anggaran (X_1) tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
- b. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X_2) berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
- c. Variabel umpan balik anggaran (X_3) berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
- d. Variabel kesulitan pencapaian tujuan (X_4) tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
- e. Variabel evaluasi anggaran (X_5) berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
- f. Variabel penerapan sistem informasi akuntansi (X_6) tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
- g. Variabel akuntabilitas publik (X_7) berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja

- perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari.
3. Variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari secara bersama-sama sebesar 96,4% dan 3,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abata, M. 2014. *Participative Budgeting and Managerial Performance in the Nigerian Food Products Sector. Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics (GJCRA) Vol: 1 Issue 3. Lagos State University, Nigeria.*
- Anthony, R. N. dan Dearden, J. 1998. *Management Control System*. Edisi 9. Homewood Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Atkinson, Anthony A., Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, and S. Mark Young . 1995. *1 st ed. Management Accounting. Englewood Cliff, New Jersey : Prentice Hall, Inc.*
- Azwar, S. 2000. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Batang Hari. Struktur Organisasi Kabupaten Batang Hari Keadaan Jabatan Struktural Per Februari 2015.
- Bangun, A. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara. Tesis.
- Bastian, I.2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Biduri, S. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi pada Pemkab Lamongan. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Deliana. 2015. *Managerial Performance in Indonesia Local Government: Impact of Budget Participation and Budget Goal Commitment. Research Journal of Finance and Accounting Vol.6, No.4. Padjajaran University.*
- Dewi, N. dan Sinarwati, N. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Gibson, R. H. dan Noreen, E. W. 2000. *Manajerial Accounting*. Terjemahan Budi Santoso. Jakarta: Salemba Empat.

- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2009. Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program SPSS: Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanny. 2013. *The Influence of Budgetary Participation on Managerial Performance at Banking Sector in Bandung and Cimahi City. International Conference on Business, Economics, and Accounting*. Bangkok-Thailand.
- Haruman, T. dan Rahayu, S. 2007. Penyusunan Anggaran Perusahaan: Edisi kedua. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung). Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Tesis.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360
- Jogiyanto. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
- Kenis, I. 1979. *Effects of Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance, The Accounting Review*. Jurnal penelitian.
- [Keuda-Kemendagri](#). 2014. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. <http://dprd.batangharikab.go.id>. 13 Maret 2014. Rujukan Elektronik.
- KPDE Kab. Batang Hari. 2014. Bupati Batang Hari Terima Penghargaan LAKIP dari Menpan dan RB RI. <http://www.jambiupdate.com/>. 9 Desember 2014.
- KPDE Kab. Batang Hari. 2015. Batang Hari Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik. <http://www.batangharikab.go.id/>. 31 Maret 2015.
- Latif, A. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Jurnal Al-Buhuts, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014.
- Manik, T. 2012. Hubungan Antara RKA SKPD dengan Renstra, Renja, dan Penganggaran Berbasis Kinerja. <https://taringot.wordpress.com> (16/10/2012). Rujukan Elektronik.
- Mahsun, M. dan Heribertus. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Ed 1. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2003. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/727_pp0906011.pdf, diakses pada 11 September 2013. Rujukan Elektronik.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Minai, B. dan Mun, M.P. 2013. *Budget Adequacy and*

- Organizational Commitment: Their Role In The Relationship Between Budget Participation dan Managerial Performance. 2nd International Conference On Management, Economics and Finance (2nd ICMEF 2013) Proceeding. Putra Malaysia University.*
- Munawar. 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. Tesis.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permadi, A. D. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga di Provinsi Jawa Barat). Universitas Widyatama. Jurnal Penelitian.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Permendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, Jakarta.
- Purnama, Y. I. 2010. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah. Universitas Teknologi Yogyakarta. Jurnal Solusi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2010.
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Universitas Negeri Padang. Jurnal Penelitian.
- Soetrisno. 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi, dan Pelimpahan Wewenang dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis di Kabupaten Rembang. Tesis. Universitas Diponegoro. Tesis.
- Sudaryanti, Dwi. 2013. Pengaruh Penganggaran terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kabupaten Kudus). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 12 Nomor 01.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suluh, A. R.B. 2009. Pengaruh Karakteristik Penganggaran terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja di KPPN Malang). Jurnal Penelitian.
- Supriyadi, E. 2015. Dispenda Batanghari akan usulkan pada Bupati evaluasi lima SKPD. <http://jambi.tribunnews.com/>. 28 Januari 2015. Rujukan Elektronik.
- Suwandi, A. P. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah (Studi

Empiris pada Pemerintah Kota Padang). Jurnal Penelitian.
Wirawati, L. P dan dkk. 2014. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. Jurnal Penelitian Akuntansi: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.